



**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 38/M-DAG/PER/8/2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB  
MENGUNAKAN *LETTER OF CREDIT***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor barang perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan kewajiban ekspor barang dengan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT*.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan *Letter Of Credit* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) Ekspor atas barang komoditi *Crude Palm Oil* (CPO), Produk Pertambangan, Kopi, Kakao, dan Karet sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dengan nilai ekspor dalam setiap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diatas 1.000.000 (satu juta) Dolar Amerika Serikat wajib dilakukan dengan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) melalui Bank Devisa Dalam Negeri.
  - (2) Ekspor atas barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dengan nilai ekspor dalam setiap PEB sampai dengan 1.000.000 (satu juta) Dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Eksportir yang melakukan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor dan Laporan Penerimaan Hasil Ekspor setiap bulan secara lengkap dan benar kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

- (2) Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, paling sedikit memuat:
    - a. identitas perusahaan;
    - b. tanggal dan nomor PEB;
    - c. volume ekspor;
    - d. nilai *Free On Board* (FOB);
    - e. cara pembayaran; dan
    - f. nomor rekening serta nama dan alamat Bank Devisa Dalam Negeri penerima hasil ekspor (*export proceed*).
  - (3) Laporan Penerimaan Hasil Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, paling sedikit memuat:
    - a. identitas perusahaan;
    - b. tanggal dan nomor PEB;
    - c. nilai penerimaan hasil ekspor; dan
    - d. nomor bukti penerimaan hasil ekspor.
  - (4) Laporan Realisasi Ekspor dan Laporan Penerimaan Hasil Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui <http://inatrade.depdag.go.id>.
  - (5) Penyampaian Laporan Realisasi Ekspor dan Laporan Penerimaan Hasil Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 31 Oktober 2009 dapat juga dilakukan melalui surat elektronik dengan alamat:
    - a. [dir1-daglu@depdag.go.id](mailto:dir1-daglu@depdag.go.id), untuk komoditi CPO, Kopi, Kakao dan Karet; dan
    - b. [dir2-daglu@depdag.go.id](mailto:dir2-daglu@depdag.go.id), untuk Produk Pertambangan.
3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) Kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C melalui Bank Devisa Dalam Negeri untuk ekspor atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 November 2009.
- (2) Ekspor atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional mulai berlaku pada tanggal 1 September 2009 sampai dengan 31 Oktober 2009.

- (3) Kewajiban pencantuman nomor dan tanggal L/C pada PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 November 2009.
  - (4) Kewajiban pencantuman pada PEB mengenai cara pembayaran L/C serta nomor dan tanggalnya, atau cara pembayaran lain serta nomor dan tanggal dokumen pembayarannya apabila ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7 dikenakan sanksi penangguhan ekspor berikutnya atas barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melakukan kembali ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini apabila eksportir telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7.

7. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan *Letter Of Credit* diubah menjadi Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2009

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

**MARI ELKA PANGESTU**

ttd

WIDODO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.**  
**NOMOR : 38/M-DAG/PER/8/2009**  
**TANGGAL : 31 Agustus 2009**

---

**DAFTAR LAMPIRAN**

1.	LAMPIRAN I	:	DAFTAR BARANG EKSPOR YANG WAJIB MENGGUNAKAN CARA PEMBAYARAN L/C.
2.	LAMPIRAN II	:	BENTUK LAPORAN REALISASI
	LAMPIRAN III	:	BENTUK LAPORAN PENERIMAAN HASIL EKSPOR

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

**MARI ELKA PANGESTU**

ttd

WIDODO

**DAFTAR BARANG EKSPOR  
 YANG WAJIB MENGGUNAKAN CARA PEMBAYARAN L/C**

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
<b>I.</b>		<b>PRODUK PERTAMBANGAN</b>
	26.01	Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi panggang - Bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi panggang :
1.	2601.11.00.00	-- Tidak diaglomerasi.
2.	2601.12.00.00	-- Diaglomerasi.
3.	2601.20.00.00	- Pirit besi panggang.
4.	2602.00.00.00	Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.
5.	2603.00.00.00	Bijih tembaga dan konsentratnya.
6.	2604.00.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya.
7.	2606.00.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya.
8.	2607.00.00.00	Bijih timbal dan konsentratnya.
	26.15	Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirconium dan konsentratnya.
9.	2615.10.00.00	- Bijih zirconium dan konsentratnya.
10.	2615.90.00.00	- Lain-lain.
	27.01	Batubara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batubara.
		- Batubara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi :
11.	2701.11.00.00	-- Antrasit.
	2701.12	-- Bituminous coal :
12.	2701.12.10.00	--- Batubara bahan bakar.
13.	2701.12.90.00	--- Lain-lain.
14.	2701.19.00.00	-- Batubara lainnya.
	80.01	Timah tidak ditempa
15.	8001.10.00.00	- Timah, bukan paduan.
16.	8001.20.00.00	- Paduan Timah.

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
<b>II.</b>		<b>MINYAK SAWIT (CPO)</b>
17.	1511.10.00.00	--- Minyak kelapa sawit, mentah.
<b>III.</b>		<b>KOPI</b>
	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
		- Kopi, tidak digongseng :
	0901.11	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
18.	0901.11.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB.
19.	0901.11.90.00	--- Lain-lain.
	0901.12	-- Dihilangkan kafeinnya :
20.	0901.12.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB.
21.	0901.12.90.00	--- Lain-lain.
		- Kopi, digongseng :
	0901.21	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
22.	0901.21.10.00	--- Tidak ditumbuk.
23.	0901.21.20.00	--- Ditumbuk.
	0901.22	-- Dihilangkan kafeinnya :
24.	0901.22.10.00	--- Tidak ditumbuk.
25.	0901.22.20.00	--- Ditumbuk.
	0901.90	-- Lain-lain
26.	0901.90.10.00	--- Sekam dan selaput kopi.
27.	0901.90.20.00	--- Pengganti kopi mengandung kopi.
<b>IV.</b>		<b>KAKAO</b>
28.	1801.00.00.00	Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng.
<b>V.</b>		<b>KARET</b>
	40.01	Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.
	4001.10	- Lateks karet alam , dipra-vulkanisasi maupun tidak ;
		-- Mengandung amoniak melebihi 0,5% :
29.	4001.10.11.00	--- Kosentrat sentrifugal.

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
30.	ex.4001.10.19.00	--- Lain-lain (hanya berlaku untuk cream latex).
		-- Mengandung amoniak tidak melebihi 0,5% :
31.	4001.10.21.00	--- Kosentrat sentrifugal.
32.	ex.4001.10.29.00	--- Lain-lain (hanya berlaku untuk cream latex).
		- Karet alam dalam bentuk lain :
	4001.21	-- Smoked sheets :
33.	4001.21.10.00	--- RSS Grade 1.
34.	4001.21.20.00	--- RSS Grade 2.
35.	4001.21.30.00	--- RSS Grade 3.
36.	4001.21.40.00	--- RSS Grade 4.
	4001.22	-- Technically Specified Natural Rubber (TSNR) : (Atau SIR, atau blok rubber, atau karet remah (crumb rubber), Termasuk spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR, kecuali yang memenuhi SNI dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium uji terakreditasi atau yang mempunyai sertifikat SPPT-SNI).
37.	4001.22.10.00	--- TSNR (SIR) 10, TSNR (SIR) 10CV / VK.
38.	4001.22.20.00	--- TSNR (SIR) 20, TSNR (SIR) 20CV / VK.
39.	4001.22.30.00	--- TSNR (SIR) 3 L.
40.	4001.22.40.00	--- TSNR (SIR) 3CV.
41.	ex. 4001.22.90.00	--- Lain-lain (hanya berlaku untuk SIR 3WF).
	4001.29	-- Lain-lain.
42.	4001.29.10.00	--- Air-dried sheet.
43.	ex.4001.29.20.00	--- Latex crepe (Thin pale crepe/TPC 1x, 2x, 3x).
44.	ex.4001.29.40.00	--- Remilled crepe (thin brown crepe/TBC 1x, 2x, 3x).
45.	ex.4001.29.70.00	--- Skim rubber (block skim rubber).
	4001.30	- Balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu. -- Jelutung.
46.	ex.4001.30.11.00	---Dalam bentuk asalan (produk primer yang diperoleh dari pengolahan dalam bentuk kering dan bersih)
		-- Lain-lain :
47.	ex.4001.30.91.00	---Dalam bentuk asalan (produk primer yang diperoleh dari pengolahan dalam bentuk kering dan bersih).

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Departemen Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

ttd

WIDODO





Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
Nomor : 38/M-DAG/PER/8/2009  
Tanggal : 31 Agustus 2009

### LAPORAN PENERIMAAN HASIL EKSPOR

Nama Perusahaan :  
Alamat Kantor Pusat :  
No Telepon :  
No Fax :  
Contact Person :  
Alamat Email :  
NPWP :

No	Nama komoditi dan Pos Tariff/HS	HASIL EKSPOR						
		Tanggal dan No PEB	Nilai Penerimaan Hasil Ekspor	Cara Pembayaran	No. Dokumen Pembayaran	Tanggal Penerimaan	No. Nota Kredit/ Rekening Koran	No. Rekening pada Bank Devisa Penerima

.....  
Pimpinan Perusahaan

( \_\_\_\_\_ )  
NAMA  
Jabatan